

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sejarah mencatat selama kurun waktu 30 tahun lebih pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, negara telah berhasil menghambat dan mengekang partisipasi rakyat dalam menentukan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Posisi eksekutif menjadi lebih dominan dan melampaui otoritas lembaga Yudikatif dan Legislatif. Elemen-elemen politik yang potensial menentang dikooptasi pemerintah demi mencapai stabilitas nasional.

Demokrasi yang dalam makna kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara.¹ Demokrasi yang sejatinya mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial, dimanipulasi dengan cara-cara represif dan intimidatif dalam rangka melanggengkan *status quo* pemerintah dan para kroninya, sehingga memunculkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Hal-hal tersebut yang pada akhirnya melahirkan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru sendiri. Aksi dan gerakan perlawanan mayoritas disuarakan oleh kaum intelektual yang dalam konteks ini adalah Mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang kritis dan memiliki intelektualitas karena mengenyam pendidikan hingga taraf tinggi. Mahasiswa

¹ Manifesto Partai Rakyat Demokratik, dalam KPP-PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, (Jakarta: Tidak diterbitkan, 1999), h. 20.

juga mampu mempresentasikan barometer yang sangat sensitif yang secara setia merefleksikan animo yang bergerak pada masyarakat.²

Pada dekade 70-an sebagai era awal pemerintahan Orde Baru mayoritas mahasiswa cenderung menggunakan konsep “Gerakan Moral”.³ Gerakan moral cenderung hanya melakukan kritik dan koreksi terhadap suatu permasalahan saja. Gerakan ini tidak memerlukan jumlah massa yang besar dan melengkapi dirinya dengan ideologi alternatif karena menurut mahasiswa pemerintahan Soeharto masih terlihat baik dan hanya perlu dikoreksi saja.⁴

Pada tahun 1970 misalnya, muncul gerakan moral yang dikenal dengan Mahasiswa Menggugat dan Gerakan Akal Sehat.⁵ Isu-isu yang diangkat menyangkut masalah pendidikan, inflasi, kenaikan BBM serta isu korupsi para pejabat. Pada tahun 1973 muncul gerakan “Petisi 24 Oktober”,⁶ yaitu aksi mendatangi gedung MPR/DPR menuntut kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru yang tidak berpihak pada rakyat karena hanya berpihak pada kelompok pengusaha dan penguasa saja, sehingga memunculkan pemerasan dan kesenjangan sosial.

² Ted Grant dan Allan Woods, *Indonesia: Revolusi Asia telah dimulai*, dalam http://www.geocities.com/frontnasional/marxisme_dan_perjuangan_melawan_ormas.html (diakses: Januari 2010)

³ Gerakan Moral yang berarti bahwa mahasiswa bertindak sebagai kekuatan moral daripada sebagai kekuatan politik. Mahasiswa muncul sebagai aktor politik saat kondisi bangsa dan negara sedang mengalami krisis, dan setelah krisis sudah mulai surut maka mahasiswa akan beranjak kembali lagi ke dalam dunia akademis kampus. Gerakan moral juga bersifat sporadis, reaktif, dan tidak terorganisir.

⁴ Arif Budiman & Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, (Jakarta: Institut Arus Informasi, 2001), h. 27.

⁵ Francois Raillon, *Ideologi Politik Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 78-82.

⁶ *Ibid.*, h. 103.

Puncak gerakan Moral terjadi pada tahun 1974 yang dikenal dengan peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari. Gerakan ini ada unsur ditunggangi oleh Militer, hal ini dikarenakan penyulutnya yang berawal dari pertarungan yang terjadi antar faksi di elit militer. Selanjutnya pada tahun 1978, gerakan mahasiswa kembali muncul dengan tuntutan yang lebih maju yaitu menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden. Namun pada akhirnya gerakan tersebut mampu dipukul mundur oleh aparat militer. Setelah kejadian tersebut pemerintah mengambil langkah untuk mensterilkan kampus dari semua kegiatan politik dengan memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)⁷ yang dikeluarkan oleh menteri P dan K Daoed Joesoef.

Adapun imbas dari kebijakan tersebut yaitu dibubarkannya Dewan Mahasiswa, pelarangan politik praktis di kampus-kampus, kekuatan militer semakin kuat di kampus-kampus, pers mahasiswa dibreidel, pencekalan terhadap para tokoh yang vokal terhadap pemerintah, hingga pelarangan buku-buku yang kontra pemerintah. Hal-hal inilah yang menandakan titik akhir berakhirnya gerakan moral mahasiswa di era Orde Baru.

Diisolasinya mahasiswa dari dunia politik ternyata tidak membuat gerakan mahasiswa langsung redup. Mahasiswa menemukan strategi baru gerakan perlawanan. Dalam hal ini muncul gerakan mahasiswa era 1990-an

⁷ NKK dikeluarkan oleh menteri P dan K Daoed Joesoef pada tanggal 19 april 1978 melalui SK No.0156/U/1978, yang intinya melarang segala bentuk kegiatan politik dan mengeskpresikannya di kampus kecuali dalam bentuk diskusi politik yang bersifat akademis. BKK dikeluarkan menteri P dan K melalui SK No.037/U/1979 tanggal 24 Februari 1979 yang merupakan lembaga yang memberikan otoritas kepada Rektor untuk sewaktu-waktu menunjuk atau mencopot struktur kepengurusan oleh mahasiswa.

dengan format gerakan yang dikenal dengan gerakan Kelompok Studi (KS). Gerakan KS merupakan wadah untuk mengasah kemampuan kritis mahasiswa atas persoalan-persoalan sosial politik serta menuangkan ide-ide kritis mengenai perubahan sosial.⁸

Kesadaran politik yang baru muncul ini hanya merupakan sebagian kecil fenomena yang merefleksikan konsolidasi kelas menengah yang khususnya Mahasiswa, meskipun demikian belum terlihat suatu konsensus mengenai signifikansi kelas menengah sebagai suatu faktor penentu perubahan politik.⁹

Walaupun begitu, Menurut Edward Espinal advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap permasalahan rakyat menjadi ciri gerakan mahasiswa era 1990-an. Advokasi tersebut berupa turun ke bawah yakni bekerja sama dengan kaum buruh, tani, dan rakyat tertindas lainnya. Pada intinya proses ini merupakan awal kemunculan suatu orientasi massa.¹⁰

Dengan demikian hal ini pula yang membedakan potret gerakan mahasiswa era 1990-an dari era-era sebelumnya. Jika pada era 1970, 1974, dan era 1978 gerakan mahasiswa hanya bersifat eksklusif, sporadis dan tak terorganisir, maka gerakan mahasiswa era 1990-an mulai terorganisir dan sudah melibatkan rakyat dalam pergerakannya. Gerakan mahasiswa era ini juga sudah berani menyuarakan tuntutan-tuntutan yang dianggap frontal dan

⁸ Muridan S Widjoyo, dkk, *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa 1998*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1999, h. 78.

⁹ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan), 1998, h. 47-49.

¹⁰ Edward Aspinal, "Gerakan Mahasiswa Tahun 1990-an", dikutip dari Ign Mahendra K dan Suharsih, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Resist Book, 2007), h. 121.

taboo, karena posisi kekuasaan Orde baru yang masih kuat dan represif kala itu.

Tuntutan yang disuarakan mahasiswa era ini lebih kepada; (1) Pencabutan Dwifungsi ABRI, (2) Pencabutan 5 paket UU Politik, (3) Turunkan Soeharto. Dalam perkembangannya era ini, kemudian lahir suatu organisasi oposisi militan dan radikal yang dikenal dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Cikal bakal PRD berawal dari organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bernama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Strategi dan format gerakan SMID yaitu dengan cara mengorganisir dan memobilisasi elemen-elemen rakyat yang diantaranya; Serikat Tani Nasional (STN) dari kalangan petani, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) dari kalangan buruh, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) dari kalangan seniman dan budayawan, Sarekat Rakyat Indonesia (SRI) dari kalangan rakyat miskin, dan Solidaritas Perjuangan Rakyat Maubere (SPRIM) sebagai basis perjuangan referendum Timor-Timur.¹¹ SMID dan organ-organ tersebut berfusi dan membentuk wadah yang bernama Persatuan Rakyat Demokratik dan kemudian mentransformasikan wadahnya menjadi Partai Rakyat Demokratik.

PRD dalam deklarasinya mendesak ditegakkannya demokrasi, supremasi sipil, dan redistribusi kekayaan negara untuk rakyat miskin. Pramoedya Ananta Toer yang seorang sastrawan terkemuka mengatakan

¹¹ Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik. Bab xii pasal 26. KPP-PRD. 1999

bahwa orang-orang muda yang tergabung dalam PRD lebih berani ketimbang pemuda generasinya. Apabila dibandingkan dengan angkatan sebelumnya perjuangan PRD mempunyai kualitas dengan nilai lebih karena mereka siap menghadapi musuh yang bersenjata tanpa menggunakan senjata.¹²

Dalam peta pemikiran dan aksi kelompok selama era Soeharto, PRD dikelompokkan sebagai kelompok radikal. Hal ini karena PRD lebih menuntut perubahan struktur masyarakat seutuhnya dan bukan hanya sekedar kritik-kritik menuntut perubahan pemerintahan seperti yang disuarakan berbagai kelompok dan oposisi di era Orde Baru.

PRD yang dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam eksistensinya telah keluar dari kampus, menjadi organisasi politik dan kemudian menjadi Partai Politik. PRD muncul bukan sebagai gerakan moral layaknya gerakan mahasiswa era 1970-an akan tetapi lebih kepada aksi-aksi politik militan.

Dalam perkembangannya banyak catatan represi yang harus diterima oleh PRD sebagai konsekuensi perjuangannya dalam menentang pemerintah Orde Baru. Sebagai contoh ketika peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Megawati pada tahun 1996 yang dikenal dengan Peristiwa 27 Juli 1996. Oleh pemerintah, PRD dianggap sebagai dalang peristiwa tersebut. Hal ini berujung pada penangkapan dan pemenjaraan para aktivis PRD yang diantaranya Budiman Sudjatmiko, Wilson, I Gusti Anom Astika dll.

¹² Pramoedya Ananta Toer dalam pidato penerimaannya sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada hari minggu 21 Maret 1999, dikutip dalam Miftahudin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, Jakarta: Desantara, 2004, h. 251.

Tak cukup sampai disitu, pemerintah Orde Baru juga melakukan propaganda dan stigmatisasi terhadap organ PRD yang dianggap sebagai sebuah sosok yang menyerupai Partai Komunis Indonesia (PKI) atau PRD Kiri serta Komunis. Hingga pada pecahnya Reformasi yang ditandai dengan tumbangannya pemerintah Soeharto, efek stigmatisasi terhadap PRD masih melekat dan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap organnya.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berbasis “Sosial Demokrasi Kerakyatan” dalam eksistensinya berada di garda depan dalam upaya-upaya perjuangan perlawanan terhadap Orde Baru. Perburuan, penangkapan, penculikan, penganiayaan hingga berujung pada pemenjaraan bagi para aktivis PRD, dianggap merupakan sebagai konsekuensi dalam totalitas perjuangannya.

Dalam deskripsi yang tertuang tersebut maka peneliti berencana untuk menulis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai objek penelitian. Hal yang menarik dari PRD karena basis perjuangan mereka yang dianggap radikal dengan jargon-jargon progresif dan revolusioner. Gerakan PRD terorganisir dengan baik dan tidak sporadis serta reaktif. PRD lebih menuntut perubahan struktur masyarakat seutuhnya dan bukan hanya sekedar kritik-kritik menuntut perubahan pemerintahan. Selain itu, hal yang menjadi keunikan dari PRD ini yaitu sistem jaringan gerakannya yang mau bersatu dengan elemen-elemen rakyat seperti buruh, tani, rakyat miskin kota dan juga kaum seniman serta budayawan dalam memperkuat basis perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk batasan masalah yang dikaji penulis hanya difokuskan pada organ PRD di wilayah Jakarta sebagai Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD). Dengan demikian sekiranya untuk wilayah teritori PRD lainnya cukup bisa terwakili. Batasan awal penelitian ini adalah dimulai pada tahun 1994. Periode ini dipandang penulis sebagai era maraknya kembali gerakan massa-mahasiswa, selain itu tahun ini juga merupakan momentum terbentuknya Persatuan Rakyat Demokratik yang kemudian berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik pada tahun 1996. Sedangkan untuk batasan akhirnya merujuk pada tahun 1999 sebagai periode pasca lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan munculnya PRD sebagai kontestan pemilu 1999. Kajian substansi penulisan ini yaitu hanya seputar eksistensi dan dinamisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai salah satu gerakan prodemokrasi di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konteks yang melatarbelakangi lahirnya Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai oposisi pemerintahan Orde Baru?
2. Bagaimana sejarah, aksi dan dinamisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam eksistensinya sebagai gerakan prodemokrasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci tujuan penelitian ini yaitu untuk merekonstruksi eksistensi dan dinamisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai salah satu gerakan prodemokrasi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan pola, format dan paradigma gerakan PRD serta latar belakang yang menggerakkan pemuda-mahasiswa yang tergabung dalam organ PRD tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam tataran mikro, penulisan ini diharapkan bagi pengembangan materi perkuliahan sejarah gerakan massa-mahasiswa Indonesia di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Universitas Negeri Jakarta. Selain itu belum banyaknya kajian literatur yang membahas secara fokus suatu gerakan politik, maka dalam tataran makro penulisan ini diharapkan berguna bagi referensi pengetahuan masyarakat khususnya mengenai salah satu bentuk gerakan prodemokrasi yang dimotori mahasiswa serta berbasis progresif dan revolusioner.

D. Metodologi Penelitian

Metode penulisan sejarah ala Louis Gottschalk mengemukakan bahwa sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹³ Maka proses penulisan sejarah dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu; (1) Heuristik atau mencari sumber (2) Verifikasi atau menilai dan menguji validitas sumber-sumber sejarah (3) Interpretasi dan (4) Historiografi atau penulisan sejarah.¹⁴

Pada tahap pertama yaitu Heuristik, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berupa fakta-fakta yang memiliki relevansi dengan substansi penulisan. Adapun sumber-sumber sejarah yang digunakan sebagai referensi penulisan terbagi atas Sumber Primer dan Sumber Sekunder.¹⁵ Sumber Primer pertama yang bersifat lisan diperoleh melalui media wawancara kepada para pelaku sejarah khususnya ditujukan kepada para aktivis PRD yang partisipatif dan kontributif dalam perjuangan PRD sebagai gerakan prodemokrasi di Indonesia. Sumber Primer kedua yang bersifat tertulis diperoleh diantaranya dari buku yang merupakan hasil terbitan organisasi PRD berjudul *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk dan Demokrasi Multi Partai; Demokrasi Tanpa 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI*.

¹³ Louis Gottschalk (terjemahan Nugroho Notosusanto), *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), h. 32-34.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), h. 89.

¹⁵ Louis Gottschalk, *loc. cit.*

Selain itu, penulis juga mengakses dan mengumpulkan sumber-sumber primer tertulis lainnya sebagai referensi tambahan yang diperoleh diantaranya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), koran terbitan sejamin serta skripsi dan berbagai tulisan ilmiah yang memiliki relevansi dengan substansi penulisan.

Untuk Sumber Sekunder penulis melakukan penelusuran melalui metode studi kepustakaan. Penulis mengakses berbagai referensi dari sumber-sumber tertulis yang diperoleh diantaranya dari buku-buku sejarah gerakan mahasiswa dan buku-buku penunjang lain yang relevan dengan substansi penulisan serta melalui akses website internet.

Pada tahap kedua penulis melakukan tahap Verifikasi sumber sejarah yang terdiri kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ini bertujuan untuk menguji keotentikan dan kredibilitas fakta-fakta yang menjadi sumber sejarah. Penulis juga melakukan kritik terhadap sumber lisan, misalnya menelaah substansi jawaban yang diutarakan oleh narasumber sesuai dengan kondisi fisiknya dan melakukan pengecekan ulang terhadap sumber lain pada susbtansi yang sama dengan pokok permasalahan.

Pada tahap ketiga yaitu Interpretasi. Penulis menafsirkan fakta-fakta yang termuat dalam sumber-sumber sejarah sesuai dengan klasifikasinya, yang kemudian dianalisa sesuai dengan sistematika berpikir dan logika penulis.

Pada tahap keempat yaitu tahap Historiografi atau penulisan sejarah keseluruhan. Dalam tahap ini penulis menyajikan tulisan sejarah yang bersifat Deskriptif Naratif yang lebih banyak menguraikan peristiwa sejarah dalam dimensi ruang dan waktu sehingga dalam pemaparannya terbentuk alur tulisan yang jelas.